

**FAKTOR FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PENERAPAN STANDAR
AKUNTANSI PEMERINTAHAN BERBASIS AKRUAL
(Studi Pada SKPD Pemerintah Kabupaten Bengkalis)**

Devi Safitri

Faculty of Economics, Universitas Riau, Pekanbaru, Indonesia

Email : dev_i_fadly@yahoo.co.id

ABSTRACT

The enactment of government regulation number 71 year 2010 about government accounting standards based accrual and also enactment permendagri 64 2013 about the application of government accounting standards based accrual on regional government bring big changes in financial reporting system in Indonesia, namely change from the base cash toward accrual become the bases full in accrual recognition government financial transactions. This research aims to analyse the influence of variable quality of human resources, information system, the commitment of the organization, and communication to the application of accrual based government accounting standards. This research conducted in Bengkalis district using data primer namely data from questionnaires filled by respondents. Object used in this research is a work unit (SKPDs) particularly office, the agency and the departement under the district government Bengkalis. The analytical tool used is multiple linear regression. The result of the research indicated that the variabel quality of human resources, information system, the commitment of the organization, and communication of its effect on applying the government accounting standards based accrual.

Keyword : quality of human resources, information system, the commitment of the organization, and communication, applying the government accounting standards based accrual.

ABSTRAK

Berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang SAP Berbasis AkruaI dan juga berlakunya Permendagri 64 Tahun 2013 tentang penerapan standar akuntansi pemerintahan berbasis akrual pada pemerintah di Indonesia, yaitu perubahan dari basis kas menuju akrual menjadi basis akrual penuh dalam pengakuan transaksi keuangan pemerintah. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh variabel kualitas sumber daya manusia, sistem informasi, komitmen organisasi dan komunikasi mempengaruhi penerapan standar akuntansi pemerintah berbasis akrual. Penelitian ini dilakukan di Kabupaten Bengkalis dengan menggunakan data primer yakni data dari kuisioner yang diisi oleh responden. Objek yang digunakan dalam penelitian ini adalah SKPD khususnya kantor, badan, dan dinas dibawah Pemerintah Daerah Kabupaten Bengkalis. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh pegawai pengelola keuangan pada kantor badan dan dinas di lingkungan pemerintah kabupaten Bengkalis. Alat analisis yang digunakan adalah regresi linier berganda dengan menggunakan software SPSS versi 20.00 untuk mengolah data. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kualitas sumber daya manusia, komitmen organisasi, sistem informasi dan komunikasi secara parsial berpengaruh signifikan terhadap penerapan standar akuntansi pemerintahan berbasis akrual.

Kata Kunci : kualitas sumber daya manusia, komitmen organisasi, sistem informasi, komunikasi, penerapan standar akuntansi pemerintahan berbasis akrual.

PENDAHULUAN

Reformasi pengelolaan keuangan negara terus dilakukan pemerintah melalui pembenahan kebijakan dan peraturan perundang – undangan, penyiapan, infrastruktur sistem keuangan baik berupa *hardware* maupun *software*, dan penyiapan sumber daya manusia termasuk penataan struktur tata organisasi pemerintahan. Dari aspek kebijakan dan peraturan perundang – undangan, reformasi pengelolaan keuangan negara telah melahirkan paket perundang – undangan negara yang baru, diantaranya adalah Undang – undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Undang – undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, dan Undang – undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara.

Dalam paket peraturan perundang – undangan keuangan negara dilakukan perubahan fundamental dengan memasukkan kerangka ilmu manajemen kinerja dan ilmu akuntansi keuangan. Dengan perubahan tersebut, entitas pemerintah melakukan pengelolaan keuangannya harus dengan berdasarkan pada perencanaan kinerja yang sudah disusun dengan sebaik – baiknya dan anggaran kinerja yang merupakan penjabaran dari perencanaan kinerja. Selain itu, di setiap periode entitas pemerintahan harus menyajikan laporan kinerja dan laporan keuangan.

Salah satu perwujudan Undang – undang Nomor 17 Tahun 2003 adalah menetapkan standar akuntansi pemerintahan berbasis akrual yang ditetapkan dalam bentuk Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 71 Tahun 2010 sebagai pengganti dari Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 24 Tahun 2005 tentang standar berbasis kas. Penerapan PP Nomor 24 Tahun 2005 memang masih bersifat sementara, hal ini sesuai dengan amanat yang tertuang dalam pasal 36 ayat (1) Undang – undang Nomor 17 Tahun 2003 yang menyatakan bahwa selama pengakuan dan pengukuran pendapatan dan belanja berbasis akrual belum dilaksanakan maka digunakan pengakuan dan pengukuran berbasis kas. Sementara itu, untuk pengakuan dan pengukuran pendapatan dan belanja akrual menurut pasal 36 ayat (1) Undang – undang Nomor 17 Tahun 2003 harus dilaksanakan selambat – lambatnya dalam 5 tahun. Perubahan standar akuntansi pemerintahan menuju berbasis akrual akan membawa dampak kepada pengelolaan keuangan negara.

Adanya penetapan PP Nomor 71 Tahun 2010 maka penerapan standar akuntansi pemerintahan berbasis akrual telah mempunyai landasan hukum. Hal ini berarti pemerintah mempunyai kewajiban untuk dapat segera menerapkan standar akuntansi pemerintahan yang baru yaitu standar akuntansi pemerintahan berbasis akrual yang harus dilaksanakan selambat – lambatnya tahun 2015. Standar akuntansi pemerintahan tersebut disusun oleh Komite Standar Akuntansi Pemerintahan (KSAP) yang independen dan ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah (PP) setelah terlebih dahulu mendapat pertimbangan dari Badan Pemeriksaan Keuangan Negara (BPK).

Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan berbasis akrual harus dilakukan secara hati – hati dengan persiapan yang matang dan terstruktur terkait dengan peraturan, sistem, dan sumber daya manusia (SDM). Kesuksesan penerapan SAP berbasis akrual sangat diperlukan sehingga pemerintah dapat menghasilkan laporan keuangan yang lebih transparan dan akuntabel. Untuk mencapai hal ini diperlukan

factor-faktor pendukung yang dapat mempengaruhi kesuksesan tersebut dan berbagai pihak.

Penelitian ini dilakukan pada Pemerintah Kabupaten Bengkalis. Penelitian ini penting dilakukan karena konsep akuntansi berbasis akrual di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkalis masih sangat baru. Walaupun Pemerintah Kabupaten Bengkalis telah melakukan berbagai persiapan dalam rangka penerapan akuntansi berbasis akrual ini, namun perlu dilakukan kajian lebih mendalam lagi sampai sejauh mana penerapan yang telah dilakukan tersebut dapat sukses secara baik pada tahun 2016. Selain itu, Pemkab Bengkalis berada pada urutan keempat yang sudah melaporkan LKPD basis akrual di Provinsi Riau, sebelumnya adalah Pemerintah Provinsi Riau, Kota Pekanbaru, dan Kabupaten Kepulauan Meranti. Pemerintah Kabupaten Bengkalis telah menyerahkan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kabupaten Bengkalis tahun 2015 kepada Kepala Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) Perwakilan Riau pada akhir maret tahun 2016, penyampaian LKPD ini memang merupakan kewajiban Pemerintah Daerah tak terkecuali Pemkab Bengkalis sebagaimana diamanatkan Permendagri No 13/2016 dan Permendagri No 21/2011 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Dimana laporan yang disampaikan Pemkab Bengkalis merupakan LKPD tahun 2015 atau LKPD pertama yang berbasis akrual, LKPD yang disampai itu diantaranya terdiri dari laporan realisasi anggaran, perubahan saldo anggaran kas, operasional, dan perubahan equitas (www.mediacenter.riau.go.id). Selain itu, penelitian untuk menerapkan basis akrual pada sektor publik ini sangat menarik minat bagi peneliti mengingat banyak pro dan kontra dalam menerapkan basis akrual. Wynne dalam Halim, (2008) misalnya, mempertanyakan apakah penerapan basis akrual pada sektor publik cukup bermanfaat sebagaimana di sektor swasta.

Banyak pro dan kontra mengenai pengimplementasian standar akuntansi pemerintahan berbasis akrual ini. Faktor pertama yang menonjol terkait dengan penerapan standar akuntansi pemerintahan berbasis akrual adalah kualitas sumber daya manusia yang dimiliki oleh pemerintah daerah (Kristyono, 2013). Sumber daya manusia yang kurang memadai menjadi masalah klasik dalam pengelolaan keuangan negara. Hal ini meliputi sumber daya manusia yang tidak kompeten dan cenderung tidak peduli terhadap perubahan. Kualitas sumber daya manusia diukur dari kemampuan pengetahuannya (*knowledge*). Semakin kuat pengetahuan dari sumber daya manusia tersebut, semakin kuat tanggung jawab dan daya saing dalam melaksanakan tugasnya (Aldiani, 2010). Selain itu, kesiapan sumber daya manusia di bidang akuntansi merupakan aspek – aspek penentu keberhasilan penerapan berbasis akrual (Bahar, 2015).

Azman (2015), Norfaliza (2015), Putra dan Ariyanto (2015) meneliti mengenai penerapan sistem akuntansi berbasis akrual. Hasil dari penelitian mereka menyatakan bahwa sumber daya manusia berpengaruh terhadap penerapan SAP berbasis akrual. Namun Widyastuti, dkk (2012) meneliti tentang analisis kesiapan pemerintah daerah dalam menetapkan SAP berbasis akrual di Kabupaten Gianyar menunjukkan hasil bahwa kesiapan sumber daya manusia di kabupaten tersebut belum siap.

Faktor kedua adalah komitmen dari organisasi / instansi dalam hal ini yang berwenang dalam pengambilan keputusan adalah pimpinan organisasi itu sendiri. Simanjuntak (2010) menyatakan bahwa dukungan yang kuat dari pimpinan merupakan kunci keberhasilan dari suatu perubahan. Salah satu penyebab

kelemahan penyusunan Laporan Keuangan pada beberapa Kementerian / Lembaga adalah lemahnya komitmen pimpinan satuan kerja khususnya SKPD penerima dana Dekonsentrasi / Tugas Pembantuan.

Norfaliza (2015), Azman (2015), Kristyono (2013) dan Widyastuti (2015) menyatakan bahwa komitmen dalam suatu organisasi berpengaruh terhadap kesiapan pemerintah dalam menerapkan SAP berbasis akrual. Namun Kusuma (2013) tidak berhasil menemukan pengaruh komitmen organisasi terhadap kesiapan pemerintah dalam menerapkan SAP berbasis akrual. Sejalan dengan Ardiansyah (2012) dan Rahmayati (2012) bahwa komitmen organisasi tidak berpengaruh terhadap kesiapan pemerintah dalam menerapkan SAP berbasis akrual.

Faktor ketiga yang tidak kalah penting adalah perangkat pendukung berupa Sistem Informasi. Sistem informasi disini maksudnya adalah kombinasi antara teknologi informasi dan interaksi pengguna teknologi informasi tersebut. Dimana system informasi yang memadai dalam pelaksanaan SAP berbasis akrual, seperti Ketersediaan komputer (*hardware*) dan program-program akuntansi pemerintahan (*software*) akan sangat membantu SKPD dalam melaksanakan tugasnya dan dalam menerapkan SAP. Besarnya peran dari perangkat pendukung ini telah dibuktikan oleh Aldiani (2010), Kristoyono (2013), Kusuma (2013) dan Norfaliza (2015) dalam penelitiannya yang menyatakan bahwa perangkat pendukung memiliki pengaruh terhadap keberhasilan penerapan sistem akuntansi berbasis akrual. Widyastuti, dkk (2015) meneliti tentang analisis kesiapan pemerintah daerah dalam menerapkan standar akuntansi pemerintahan berbasis akrual di Kabupaten Gianyar, hasilnya menunjukkan bahwa sistem informasi sudah ada sistem khusus. Namun dalam penelitian Azman (2015) menemukan bahwa sistem informasi tidak berpengaruh terhadap penerapan SAP berbasis akrual. Mongoloi dan Siswanto (2013) yang meneliti tentang analisis kesiapan penerapan akuntansi berbasis akrual pada biro keuangan juga menemukan bahwa sistem informasi belum berpengaruh terhadap penerapan standar akuntansi pemerintahan berbasis akrual.

Faktor keempat yang juga mendukung keberhasilan penerapan standar akuntansi pemerintahan berbasis akrual adalah komunikasi. Menurut Edwar dalam Herlinan (2013) ada beberapa variabel yang mempengaruhi proses implementasi, salah satunya adalah komunikasi. Komunikasi kebijakan yang efektif adalah para pelaksana kebijakan mengetahui apa yang mereka kerejakan, hal ini menyangkut proses penyampaian informasi, kejelasan informasi dan konsistensi yang disampaikan. Ardiansyah (2012) menyatakan bahwa komunikasi berpengaruh terhadap kesiapan penerapan standar akuntansi pemerintah berbasis akrual tersebut. Namun dalam penelitian Iznillah (2015) menyatakan bahwa komunikasi tidak berpengaruh terhadap kesiapan penerapan standar akuntansi pemerintah berbasis akrual.

Topik mengenai penerapan standar akuntansi pemerintah berbasis akrual pada sektor publik ini menarik untuk diteliti karena konsep ini masih tergolong baru. Basis akrual merupakan salah satu isu terhangat yang dihadapi oleh Komite Standar Akuntansi Pemerintah Indonesia mengingat dengan dikeluarkan PP No 71 Tahun 2010 yang mengharuskan pada tahun 2015 pada sektor publik terutama di instansi Pemerintah sudah harus melakukan adopsi basis akrual secara keseluruhan. Kebanyakan penelitian tentang implementasi SAP berbasis akrual ini adalah meneliti bagaimana dalam kesiapannya, maka karena saat ini pemerintah sudah mengharuskan akrual dan setiap pemerintah sudah menjalani SAP berbasis

akrual, maka peneliti tertarik untuk mengetahui bagaimana penerapannya. Penelitian ini mengacu kepada penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Azman (2015) dan Iznillah (2015).

Penelitian-penelitian terdahulu menunjukkan hasil yang tidak seragam. Melihat pentingnya penerapan standar akuntansi pemerintahan berbasis akrual di Kabupaten Bengkalis, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul "Faktor – Faktor Yang Mempengaruhi Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual (Studi Empiris Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Bengkalis)"

TINJAUAN TEORITIS

Pengaruh Kualitas Sumber Daya Manusia Terhadap Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrual

Sumber Daya Manusia merupakan pilar penyangga utama sekaligus penggerak roda organisasi dalam usaha mewujudkan visi dan misi serta tujuan dari organisasi. Kegagalan sumber daya manusia Pemerintah daerah dalam memahami dan menerapkan logika akuntansi akan berdampak pada kekeliruan laporan keuangan yang dibuat dan ketidaksesuaian laporan dengan standar yang ditetapkan pemerintah (Warisno dalam Putri, 2010).

Sumber Daya Manusia memiliki peranan sentral dalam menentukan keberhasilan penerapan SAP berbasis akrual. Hal ini didukung oleh Krumwiede dalam Kusuma (2013) menunjukkan pelatihan yang memadai memiliki efek positif terhadap kesuksesan adopsi sistem akuntansi. Dengan adanya pelatihan akuntansi berbasis kas menuju basis akrual, dapat memberikan pemahaman penerapan SAP berbasis akrual dan menghasilkan Sumber Daya Manusia yang berkualitas.

Iznillah (2015), menyatakan dalam penelitiannya bahwa kualitas sumber daya manusia berpengaruh terhadap penerapan standar akuntansi berbasis akrual. Penelitian oleh Sukadana dan Mimba (2015) juga menyatakan terdapat pengaruh yang positif antara kualitas sumber daya manusia terhadap penerapan standar akuntansi berbasis akrual. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa:

H₁: Kualitas Sumber daya manusia berpengaruh terhadap Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrual

Pengaruh Komitmen Organisasi Terhadap Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrual

Menurut Robbins (2002:15), komitmen organisasi adalah sebagai keadaan dimana seorang karyawan memihak pada suatu organisasi tersebut dan tujuan-tujuannya, serta berniat untuk memelihara keanggotanya dalam organisasi tersebut. Pada pemerintah daerah, aparat yang memiliki komitmen organisasi yang tinggi akan menggunakan informasi yang dimiliki. Kejelasan sasaran anggaran akan mempermudah Aparat Pemerintah Daerah dalam menyusun anggaran untuk mencapai target anggaran yang telah ditetapkan. Komitmen yang tinggi dari Aparat Pemerintah Daerah akan berimplikasi pada komitmen untuk bertanggungjawab terhadap penyusunan anggaran tersebut.

Dalam penelitiannya, Azman (2015), Norfaliza (2015), dan Widyastuti, dkk (2015) menyatakan bahwa komitmen organisasi dalam suatu pemerintah berpengaruh terhadap penerapan standar akuntansi pemerintahan berbasis akrual.

Putra dan Ardiyanto (2015) juga menyatakan bahwa terdapat pengaruh yang positif antara komitmen dalam suatu organisasi dengan kesiapan pemerintah dalam menerapkan sistem akuntansi pemerintah berbasis akrual. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa:

H₂ : Komitmen organisasi berpengaruh terhadap penerapan standar akuntansi pemerintah berbasis akrual

Pengaruh Sistem Informasi Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrua

Sistem Informasi yang memadai dalam pelaksanaan SAP berbasis akrual. Ketersediaan komputer (*hardware*) dan program-program akuntansi pemerintahan (*software*) akan sangat membantu SKPD dalam melaksanakan tugasnya dalam menerapkan SAP berbasis akrual.

Penelitian Widyastuti, dkk (2013), menyatakan bahwa sistem informasi berpengaruh terhadap kesiapan pemerintah dalam menerapkan sistem akuntansi pemerintah berbasis akrual. Kusuma (2013) juga dalam penelitiannya menyatakan bahwa sistem informasi memiliki pengaruh terhadap keberhasilan penerapan standar akuntansi berbasis akrual. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa:

H₃ : Sistem informasi berpengaruh terhadap Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrua

Pengaruh Komunikasi Terhadap Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrua

Menurut Edwar dalam Herlina (2013) komunikasi adalah salah satu faktor yang mempengaruhi proses implementasi. Persyaratan utama bagi komunikasi kebijakan yang efektif adalah para pelaksana kebijakan mengetahui apa yang mereka kerjakan. Hal ini menyangkut proses penyampaian informasi dan konsistensi informasi yang disampaikan. Sedangkan menurut Robbins (2001:392) menyatakan bahwa komunikasi adalah proses penyampaian dan pemahaman makna. Sehebat apapun gagasan, tidak akan berguna jika tidak diteruskan dan dipahami orang lain. Komunikasi yang baik merupakan hal yang sangat penting bagi efektivitas kelompok atau organisasi manapun. Komunikasi yang baik dalam suatu organisasi akan dapat bekerja secara sistematis untuk meningkatkan produktivitas khususnya dalam menerapkan SAP berbasis akrual. Hasil ini sesuai dengan penelitian yang telah dilakukan Ardiansyah (2012) bahwa komunikasi berpengaruh terhadap kesiapan penerapan SAP berbasis akrual. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa:

H₄ : Komunikasi berpengaruh terhadap penerapan standar akuntansi pemerintah berbasis akrual

METODE PENELITIAN

Populasi dalam penelitian ini adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di Pemerintah Kabupaten Bengkalis. Adapun jumlah keseluruhan populasi adalah 35 Satuan Kerja Perangkat Daerah, dan sampel yang diambil dari tiap-tiap unit Satuan Kerja Perangkat. Adapun metode pengambilan sampel yang digunakan adalah metode *purposive sampling* yaitu teknik penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu (Sugiyono, 2013:85). Responden dipilih dengan kriteria yang

menjadi pelaksana pengelolaan keuangan langsung, yaitu kuasa pengguna keuangan (KPA), Pejabat pelaksana teknis kegiatan (PPTK) dan Bendahara pengeluaran pembantu (BPP) SKPD di Pemda Kabupaten Bengkalis.

Untuk mendapatkan data yang diperlukan, peneliti menggunakan instrumen berupa kuesioner yang diberikan kepada SKPD Kabupaten Bengkalis. Pengumpulan data dilakukan dengan teknik *personally administered questionnaires*, yaitu kuesioner disampaikan dan dikumpulkan secara langsung oleh peneliti. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kuantitatif yang berupa nilai atau skor jawaban yang diberikan oleh respon terhadap pertanyaan-pertanyaan yang ada dalam kuesioner.

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu data primer. Menurut Sugiono, (2012:129) data primer merupakan sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data.

Variabel independen dalam penelitian ini adalah Kualitas Sumber Daya Manusia (X_1), Sistem Informasi (X_2), Komitmen Organisasi (X_3), dan Komunikasi (X_4). Sedangkan variabel dependen adalah Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrua (Y). Variabel ini diukur menggunakan instrumen yang terdiri pertanyaan dengan skala *Ordinal 5* point, yaitu mulai dari poin (1) sangat tidak Setuju, (2) tidak setuju, (3) ragu-ragu, (4) setuju dan (5) sangat setuju.

Analisis Data

Uji Kualitas Data

Uji Validitas digunakan untuk menguji akurat tidaknya suatu kuesioner. Pada penelitian ini menggunakan Uji Korelasi *Bivariate Pearson*, yaitu menganalisis dengan cara mengkorelasi masing-masing skor item dengan skor total.

Uji reliabilitas berguna untuk menetapkan apakah instrumen yang dalam hal ini kuesioner dapat digunakan lebih dari satu kali, paling tidak oleh responden yang sama akan menghasilkan data yang konsisten. Dengan kata lain, reliabilitas instrumen mencirikan tingkat konsistensi.

Uji Normalitas berguna untuk menguji apakah dalam model regresi, variabel pengganggu atau residual memiliki distribusi normal (Ghozali,2013:147). Model regresi yang baik adalah data yang terdistribusi normal atau mendekati normal. Metode yang digunakan adalah dengan *kolmogorov smirnov*. Kriteria yang digunakan dalam tes ini adalah dengan membandingkan antara tingkat signifikansi yang didapat dalam tingkat alpha yang digunakan, dimana data tersebut dikatakan berdistribusi normal bila $sig > 0,05$.

Uji Asumsi Klasik

Uji Multikolonieritas bertujuan untuk membuktikan atau menguji apakah dalam suatu model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas (independen). Model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi kolerasi antara variabel independen. Nilai *cutoff* yang umum dipakai untuk menunjukkan adanya multikolonieritas adalah nilai *tolerance* < 0,10 atau sama dengan nilai VIF > 10 (Ghozali, 2013:106).

Uji heterokedastisitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan *variance* dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain. Model regresi yang baik adalah yang homokedastisitas atau tidak terjadi heterokedastisitas.

Uji autokorelasi bertujuan untuk menguji apakah dalam sebuah model regresi linier ada korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode sebelumnya, jika ada berarti terdapat autokorelasi. Untuk melihat ada atau tidaknya gejala autokorelasi ini maka dapat dilakukan dengan menggunakan uji Durbin-Waston (DW test). Uji ini dilakukan dengan membandingkan nilai d (Durbin-Watson), du (*Upper Bound*), dan $4-du$.

Analisis Regresi Linier Berganda

Dalam penelitian ini, alat analisis menggunakan model regresi linier berganda dengan mendapatkan persamaan regresi adalah:

$$Y = a + b_1X_1 + b_2X_2 + b_3X_3 + b_4X_4 + e$$

Di mana:

Y	: Penerapan SAP Akrual	X ₂	: Komitmen Organisasi
a	: Konstanta	X ₃	: Sistem Informasi
b _{1,2,3,4,5}	: Koefisien Regresi	X ₄	: Komunikasi
X ₁	: Kualitas SDM	e	: Error

Uji Koefisien Determinasi

Koefisien determinasi (R^2) pada intinya mengukur seberapa besar kemampuan variabel-variabel independen dalam menerangkan variasi variabel dependen. Nilai koefisien determinasi adalah antara 0 (nol) dan 1 (satu). Nilai (R^2) yang kecil berarti kemampuan variabel-variabel independen memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variasi variabel dependen.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Statistik Deskriptif

Tabel 1
Hasil Statistik Deskriptif

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
Kualitas SDM	81	28,00	50,00	40,4444	5,16236
Sistem Informasi	81	16,00	30,00	23,9383	3,20291
Komitmen Organisasi	81	12,00	20,00	16,4691	2,04992
Komunikasi	81	25,00	45,00	35,3333	5,15752
Sistem SAP Berbasis Akrual	81	23,00	40,00	31,5432	4,31581
Valid N (listwise)	81				

Sumber : Data Olahan SPSS, 2016

Berdasarkan pengujian statistik deskriptif diatas, bahwa variabel statistik deskriptif masing-masing instrumen dari sebanyak 81 responden yang diteliti. Untuk instrumen variabel kualitas sumber daya manusia memiliki nilai minimum sebesar 28,00 nilai maksimum 50,00 dan nilai rata-rata (*mean*) sebesar 40,4444 dengan standar deviasi sebesar 5,16236. Untuk instrumen variabel sistem informasi memiliki nilai minimum sebesar 16,00, nilai maksimum 30,00 dan nilai rata-rata

sebesar 23,9383 dengan standar deviasi sebesar 3,20291. Untuk instrumen variabel komitmen organisasi memiliki nilai minimum sebesar 12,00, nilai maksimum 20,00 dan nilai rata-rata sebesar 16,4691 dengan standar deviasi sebesar 2,04992. Untuk instrumen variabel komunikasi memiliki nilai minimum sebesar 25,00, nilai maksimum 45,00 dan nilai rata-rata sebesar 35,3333 dengan standar deviasi sebesar 5,15752. Untuk instrumen variabel penerapan standar akuntansi pemerintah berbasis akrual memiliki nilai minimum sebesar 23,00, nilai maksimum 40,00 dan nilai rata-rata sebesar 31,5432 dengan standar deviasi sebesar 4,31581.

Berdasarkan data diatas, nilai rata – rata (*mean*) lebih besar dari pada standar deviasi. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa data yang akan digunakan adalah layak dan valid.

Hasil Uji Validitas Data

Uji signifikansi dilakukan dengan membandingkan nilai r_{hitung} dengan r_{tabel} untuk *degree of freedom* (df) = $n - 2$ dengan alpha 0,05, dalam hal ini n adalah jumlah sampel (Ghozali, 2013:53). Dalam penelitian ini $df = n-2$ ($81-2$) = 79, sehingga didapat r_{tabel} untuk df (79) = 0,2759. Dari pengujian yang dilakukan diketahui nilai r_{hitung} seluruh item pertanyaan variabel > 0,2185. Artinya adalah bahwa item-item yang digunakan untuk mengukur masing-masing variabel dinyatakan valid.

Hasil Uji Realibilitas Data

Pengujian reliabilitas penelitian ini menggunakan koefisien *Cronbach Alpha* () dengan taksiran batasan minimal 0,6. Suatu variabel dikatakan reliabel jika memberikan nilai *Cronbach Alpha* > 0,6. Berdasarkan hasil pengujian reliabilitas pada Tabel 2 dapat dilihat bahwa koefisien reliabilitas instrumen penerapan SAP berbasis akrual, kualitas SDM, Sistem Informasi, Komitmen Organisasi, Komunikasi, antara lain 0,908, 0,945, 0,933, 0,889, 0,928. Dari semua nilai variabel tersebut menunjukkan bahwa koefisien *Cronbach Alpha* > 0,6 sehingga dapat disimpulkan bahwa semua instrumen dalam penelitian ini adalah reliabel atau dapat dipercaya.

Tabel 2
Hasil Uji Reliabilitas

Variabel	Cronbach's Alpha	Nilai Kritis	Kesimpulan
Penerapan SAP Berbasis Akrual	0,908	0,6	Reliabel
Kualitas Sumber Daya Manusia	0,945	0,6	Reliabel
Sistem Informasi	0,933	0,6	Reliabel
Komitmen Organisasi	0,889	0,6	Reliabel
Komunikasi	0,928	0,6	Reliabel

Sumber: Data Olahan dengan SPSS 20.0 (2016)

Uji Normalitas Data

Tabel 3
Kolmogorov – Smirnov Test
One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

		Unstandardized Residual
N		81
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	0E-7
	Std. Deviation	,18209849
	Absolute	,138
Most Extreme Differences	Positive	,138
	Negative	-,111
Kolmogorov-Smirnov Z		1,239
Asymp. Sig. (2-tailed)		,093

a. Test distribution is Normal.

b. Calculated from data.

Sumber : Data Olahan SPSS, 2016

Berdasarkan pengujian yang dilakukan diperoleh nilai signifikansi sebesar 0,093. Jika digunakan tingkat signifikansi = 0,05 maka nilai signifikan lebih besar dari (0,093 > 0,050), sehingga dapat disimpulkan bahwa data model regresi memenuhi asumsi normalitas.

Hasil Uji Multikolinearitas

Tabel 4
Hasil Uji Multikolineritas

Model	Collinearity Statistics		Keterangan
	Tolerance	VIF	
(Constant)			Bebas Dari Multikolinieritas
Kualitas Sumber Daya Manusia	0,185	5,396	
Sistem Informas	0,144	6,950	
Komitmen Organisasi	0,263	3,799	
Komunikasi	0,189	5,288	

Sumber : Data Olahan SPSS, 2016

Berdasarkan pengujian yang dilakukan diketahui nilai *variance inflation factor* (VIF) untuk seluruh variabel bebas < 10 dan begitu juga untuk nilai tolerance > 0,10. Hal ini dapat disimpulkan bahwa model regresi tersebut bebas dari multikolinearitas.

Tabel 5
Hasil Uji Heterokedastisitas (Coefficients^a)

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
(Constant)	-1,179E-015	,093		,000	1,000
Kualitas SDM	,000	,069	,000	,000	1,000
1 Sistem Informasi	,000	,076	,000	,000	1,000
Komitmen Organisasi	,000	,057	,000	,000	1,000
Komunikasi	,000	,069	,000	,000	1,000

a. Dependent Variable: Abslut

Berdasarkan hasil uji heteroskedastisitas diketahui bahwa nilai probabilitas (*sig.*) semua variabel > 0.05 maka dapat disimpulkan tidak terjadi heteroskedastisitas.

Analisis Regresi Berganda

Pengujian ini dilakukan dengan menggunakan analisis regresi untuk mengetahui keberadaan pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat. Pengolahan data pada penelitian ini menggunakan model *multiple regression* (regresi berganda) dengan menggunakan SPSS.

Berikut disajikan tabel hasil pengolahan data SPSS secara ringkas yang menggambarkan persamaan regresinya.

Tabel 6
Hasil Uji Regresi Berganda
Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
(Constant)	,428	,093		4,606	,000
1 Kualitas SDM	,150	,069	,159	2,167	,033
Sistem Informasi	,291	,076	,321	3,849	,000
Komitmen Organisasi	,260	,057	,280	4,537	,000
Komunikasi	,252	,069	,264	3,636	,001

a. Dependent Variable: Penerapan SAP Berbasis Akruar

Sumber: Data Olahan SPSS,2016

Dari Tabel diatas maka dibuat persamaan regresi sebagai berikut :

$$Y = 0,428+ 0,150X_1 + 0,291X_2 + 0,260X_3+ 0,252X_3+ e$$

Dari hasil regresi diatas, dapat diketahui bahwa variabel Kualitas SDM, Sistem Informasi, Komitmen Organisasi, dan Komunikasi berpengaruh terhadap Penerapan SAP Berbasis Akruar

Uji Statistik t (Parsial)

Uji t bertujuan untuk menguji seberapa jauh pengaruh satu variabel independen secara individual dalam menerangkan variabel dependen. Untuk dapat mengetahui apakah ada pengaruh yang signifikan dari masing-masing variabel independen, maka dibandingkan antara nilai t_{hitung} dengan t_{tabel} serta membandingkan nilai signifikan t dengan *level of significant* (). Nilai dari *level of significant* yang digunakan dalam penelitian ini adalah 5 persen (0,05). Apabila $t_{hitung} > t_{tabel}$ maka H_0 ditolak dan begitu sebaliknya jika Apabila $t_{hitung} < t_{tabel}$ maka H_0 diterima. Dan apabila $sig\ t > 0.05$ maka H_0 diterima. Demikian pula sebaliknya jika $sig\ t < 0.05$, maka H_0 ditolak. Bila H_0 ditolak ini berarti ada hubungan yang signifikan antara variabel independen terhadap variabel dependen.

Hasil Pengujian Hipotesis

H₁: Kualitas Sumber Daya Manusia Berpengaruh Terhadap Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akruwal

Dari Tabel 18 di atas dapat dilihat bahwa $t_{hitung} > t_{tabel}$ yaitu $2,167 > 1,991$ dan $sig.t (0,033) < 0,05$ dengan demikian H_0 ditolak dan H_1 diterima. Dari hasil pengujian tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa kualitas sumber daya manusia berpengaruh positif terhadap penerapan akuntansi pemerintahan berbasis akruwal. Hal ini berarti bahwa semakin tinggi kualitas sumber daya manusia dalam pemahaman standar akuntansi pemerintahan berbasis akruwal, maka semakin tinggi tingkat penerapan standar akuntansi pemerintahan berbasis akruwal pemerintah daerah kabupaten Bengkalis.

Hasil penelitian ini sesuai dengan penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Putra dan Ariyanto (2015) menemukan bukti adanya pengaruh kualitas sumber daya manusia terhadap penerapan standar akuntansi pemerintahan berbasis akruwal.

H₂: Sistem Informasi Berpengaruh Terhadap Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akruwal

Dari Tabel 6 di atas dapat dilihat bahwa $t_{hitung} > t_{tabel}$ yaitu $3,849 > 1,991$ dan $sig.t (0,000) < 0,05$ dengan demikian H_0 ditolak dan H_2 diterima. Dari hasil pengujian tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa sistem informasi berpengaruh positif terhadap penerapan akuntansi pemerintahan berbasis akruwal. Hal ini berarti bahwa semakin tinggi sistem informasi yang dimiliki dalam menerapkan standar akuntansi pemerintahan berbasis akruwal, maka semakin tinggi tingkat penerapan standar akuntansi pemerintahan berbasis akruwal pemerintah daerah kabupaten Bengkalis.

Hasil penelitian ini sesuai dengan penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Aldiani (2010), Kristoyono (2013), Kusuma (2013) dan Norfaliza (2015) dalam penelitiannya yang menyatakan bahwa perangkat pendukung memiliki pengaruh terhadap keberhasilan penerapan sistem akuntansi berbasis akruwal.

H₃: Komitmen Organisasi Berpengaruh Terhadap Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akruwal

Dari Tabel 18 di atas dapat dilihat bahwa $t_{hitung} > t_{tabel}$ yaitu $4,537 > 1,991$ dan $sig.t (0,001) < 0,05$ dengan demikian H_0 ditolak dan H_3 diterima. Dari hasil pengujian tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa komitmen organisasi berpengaruh positif terhadap penerapan akuntansi pemerintahan berbasis akruwal. Hal ini berarti bahwa semakin tinggi komitmen organisasi dalam penerapan standar akuntansi pemerintahan berbasis akruwal, maka semakin tinggi pula tingkat penerapan standar akuntansi pemerintahan berbasis akruwal pemerintah daerah kabupaten Bengkalis.

Hasil penelitian ini sesuai dengan penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Azman (2015), Norfaliza (2015), Widyastuti, dkk (2015), Putra dan Ariyanto (2015) menyatakan bahwa komunikasi berpengaruh terhadap penerapan standar akuntansi pemerintahan berbasis akruwal.

H₄: Komunikasi Berpengaruh Terhadap Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrua

Dari Tabel 18 di atas dapat dilihat bahwa $t_{hitung} > t_{tabel}$ yaitu $3,636 > 1,991$ dan $sig.t (0,001) < 0,05$ dengan demikian H_0 ditolak dan H_4 diterima. Dari hasil pengujian tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa komunikasi berpengaruh positif terhadap penerapan akuntansi pemerintahan berbasis akrua. Hal ini berarti bahwa semakin baik komunikasi yang dilakukan SKPD dalam mensosialisasikan dan menerapkan standar akuntansi pemerintahan berbasis akrua, maka semakin tinggi tingkat penerapan standar akuntansi pemerintahan berbasis akrua pemerintah daerah Bengkalis.

Hasil penelitian ini sesuai dengan penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Ardiansyah (2012), Herlina (2013), Putra dan Ariyanto (2015) menyatakan bahwa komunikasi berpengaruh terhadap penerapan standar akuntansi pemerintahan berbasis akrua.

Koefisien Determinasi (R²)

R Square (R²) atau kuadrat dari R menunjukkan koefisien determinasi, yang artinya persentase sumbangan pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen. Berikut disajikan hasil uji koefisien determinasi, yaitu :

Tabel 7
Hasil Uji Koefisien Determinasi
Model Summary

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	,961 ^a	,924	,920	,18683

a. Predictors: (Constant), Komunikasi, Komitmen Organisasi, Kualitas Sumber Daya Manusia, Sistem Informasi

Sumber: Data olahan SPSS, 2016

Berdasarkan Tabel 6 diatas dapat dilihat bahwa nilai Adjusted R Square sebesar 0.920. Artinya adalah bahwa sumbangan pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen adalah sebesar 92%. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa sebesar 92% penerapan standar akuntansi pemerintahan berbasis akrua dipengaruhi oleh variabel kualitas sumber daya manusia, sistem informasi, komitmen organisasi, dan komunikasi. Sedangkan sisanya 8% dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak dimasukkan dalam model regresi ini.

SIMPULAN DAN SARAN

Simpulan

Penelitian ini bertujuan untuk menguji secara parsial apakah kualitas Dari hasil peneitian dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Hasil pengujian hipotesis pertama menunjukkan bahwa variabel kualitas sumber daya manusia berpengaruh terhadap penerapan standar akuntansi pemerintahan berbasis akrua
2. Hasil pengujian hipotesis kedua menunjukkan bahwa variabel sistem informasi berpengaruh terhadap penerapan standar akuntansi pemerintahan berbasis akrua.

3. Hasil pengujian hipotesis ketiga menunjukkan bahwa komitmen organisasi berpengaruh terhadap penerapan standar akuntansi pemerintahan berbasis akrual.
4. Hasil pengujian hipotesis keempat menunjukkan bahwa komunikasi berpengaruh terhadap penerapan standar akuntansi pemerintahan berbasis akrual.

Saran

Saran-saran yang dapat diberikan oleh peneliti bagi penelitian selanjutnya yaitu :

1. Bagi peneliti selanjutnya dapat mengganti objek penelitian ke lingkup yang lebih luas (pemerintah pusat) atau lingkup di daerah lain yang berbeda karakteristiknya.
2. Peneliti selanjutnya yang ingin meneliti dengan topik yang sama dapat menambahkan variabel lain yang mungkin dapat mempengaruhi keberhasilan penerapan standar akuntansi pemerintahan berbasis akrual.

DAFTAR PUSTAKA

- Aldiani, Sulani. 2010. *Faktor – Faktor Pendukung Keberhasilan Penerapan Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2005 pada Pemerintah Kabupaten Labuhan Batu*. Jurnal Akuntansi 12, Departemen Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Sumatera Utara.
- Ardiansyah, 2012. *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kesiapan Pemerintahan Daerah Dalam Implementasi PP 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Studi Pada Unit Kerja KPPN Malang)*. Skripsi, Universitas Brawijaya, Malang.
- Azman, 2015. *Analisis Komitmen Organisasi, Kesiapan Sumber Daya Manusia, Infrastruktur Serta Sistem Informasi Dalam Menerapkan Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrua (Studi Pada Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti)*. Jurnal SOROT, Volume 10, Nomor 1, April 2015.
- Bastian, Indra. 2006. *Akuntansi Sektor Publik*. Jakarta: Penerbit Erlangga
- Bkd.bengkalisKab.go.id
- GoRiau. 2015. “2015 Pemkab Bengkalis Sangat Berkomitmen Menerapkan SAP Berbasis Akrua”. (Online). Tersedia: <http://goriau.com/>
- Halim, Abdul. (2004). *Reformasi Akuntansi Keuangan dan Anggaran Daerah : Dua Pilar utama Manajemen Keuangan Daerah*. Pidato Pengukuhan Jabatan Guru besar pada Fakultas Ekonomi Universitas Gadjah Mada. Tidak diterbitkan.
- Herlina, Hetti. 2013. *Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kesiapan Pemerintah Daerah Dalam Implementasi PP 71 Tahun 2010 (Studi Empiris Kabupaten Nias Selatan)*. Jurnal Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang.

- Imam, Ghozali. 2009. *Aplikasi Analisis Multilavare dengan Program SPSS*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Iznillah, M Luthfi, 2015. *Pengaruh Kualitas Sumber Daya Manusia, Komitmen Organisasi, Teknologi Informasi, Dan Komunikasi Terhadap Kesiapan Pemerintah Dalam Menerapkan Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrual (Studi Empiris Pada Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir)*. Jurnal
- KSAP. 2010. *Implementasi Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah*. Makalah disajikan dalam Seminar Pentahapan Implementasi SAP Akrual Pemda, Jakarta, 25 Maret.
- Komite Standar Akuntansi Pemerintah. 2012. *Peraturan Pemerintah RI No.71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi pemerintah*. Salemba Empat, Jakarta.
- Komite Standar Akuntansi Pemerintah. 2012. *Peraturan Pemerintah RI No.71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi pemerintah*. Salemba Empat, Jakarta
- Kusuma, Ririz Setiawati., 2013. *Analisis Kesiapan Pemerintah Dalam Menerapkan Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrual (Kasus Pada Pemerintah Kabupaten Jember)*. Skripsi.
- MediaCenter. 2016. "Bupati Bengkalis Serahkan LKPD 2015". (Online). Tersedia: <http://mediacenter.riau.go.id/>
- Nordiawan, Deddi. 2007. *Akuntansi Sektor Publik*. Jakarta: Salemba Empat.
- Norfaliza, 2015. *Analisis Faktor Kesiapan Pemerintah Dalam Menerapkan Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrual (Studi Kasus Pada SKPD Kabupaten Rokan Hilir)*. Jurnal
- Peraturan Pemerintah No.24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Kas
- Peraturan Pemerintah No.71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual
- Putra dan Ariyanto, 2015. *Faktor – Faktor Yang Mempengaruhi Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual*, Jurnal Akuntansi Universitas Udayana.
- Ranuba, Erlita D.S., S. Pangemanan dan S. Pinatik, 2015. *Analisis Kesiapan Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrual Berdasarkan Pp No. 71 Tahun 2010 Pada Dpkpa Minahasa Selatan*. Jurnal
- Republik Indonesia, 2010. *Peraturan Pemerintah Nomor/71/2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan*. Republik Indonesia, 2000.
- Republik Indonesia, 2005. *Peraturan Pemerintah Nomor/24/2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan*.

Robbins, Stephen P., and Timothy A. Judge. 2009. *Perilaku Organisasi*. Buku 1. Jakarta : Salemba Empat

Sekaran, Uma. 2007. *Research Methods For Business Metodologi, Penelitian Untuk Bisnis*. Edisi Empat. Jakarta: Salemba Empat.

Simanjuntak, Binsar H. 2010. *Penerapan Akuntansi Berbasis AkruaI di Sektor Pemerintahan Indonesia*. Jakarta: Disampaikan pada Kongres XI Ikatan Akuntansi Indonesia.

Sugiyono. 2012. *Metode Penelitian Bisnis*. Bandung: Alfabeta

Undang – Undang No. 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara.